

BAB VI

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

6.1 RPJM KE-1 (RENSTRADA TAHUN 2005-2006 & RENSTRA TRANSISI 2007) / TAHAP REVITALISASI - I

Pada tahap awal, sebagai provinsi yang baru terbentuk, Banten dihadapkan pada berbagai persoalan khususnya terkait dengan perbaikan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara di sisi lain, Provinsi Banten masih dalam proses penataan kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya aparatur dan anggaran. Oleh karena itu pada tahap awal ini diarahkan pada upaya revitalisasi pembangunan.

Adapun prioritas dan fokus pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar diarahkan pada peningkatan kualitas prasarana dasar wilayah, penataan permukiman, penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh, pengembangan kawasan pusat pemerintahan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
Membentuk karakter dan jati diri, berakhlak mulia dan berbudaya, meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat, derajat kesehatan, keberdayaan perempuan, perlindungan anak, keberdayaan masyarakat desa, kepemudaan dan olah raga.
3. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian;
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, daya saing produk berbasis keunggulan dan sumberdaya lokal, ketahanan pangan, prasarana dan sarana perekonomian.
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Peningkatan kesejahteraan sosial, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pengembangan UMKM-K, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ketenagakerjaan, penurunan jumlah rumah tangga miskin.
5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Meningkatkan kualitas tata ruang, kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan pelestarian sumber daya alam, mitigasi bencana, peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, akses pelayanan publik, kapasitas keuangan daerah, ketaatan hukum, kehidupan demokrasi, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Perencanaan dan Penataan Pelabuhan-Pelabuhan Lokal, Nasional, dan Internasional.
Perencanaan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional, kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kawasan pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan/minapolitan, aksesibilitas penghubung antar kawasan.

Dengan melaksanakan pembangunan daerah pada tujuh prioritas tersebut, dicapai kualitas kehidupan masyarakat Banten pada tahun 2007 yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,28.

6.2 RPJM KE-2 (TAHUN 2008-2012) / TAHAP REVITALISASI - II

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode/tahap sebelumnya, maka pembangunan Provinsi Banten pada tahap 5 (lima) tahun ke-2 ini diprioritaskan pada upaya merevitalisasi lanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Melanjutkan upaya pengembangan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar seperti: jalan, jembatan, irigasi, terminal, dan pelabuhan, peningkatan pengelolaan sumberdaya air, peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah, peningkatan pelayanan energi dan listrik, pengembangan pemanfaatan energi alternatif, meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh.
2. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Penaggulangan dampak krisis keuangan global, penurunan jumlah penduduk sangat miskin dan miskin, penurunan angka pengangguran, pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
Pembinaan dan peningkatan pemahaman dan penghayatan norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan kerukunan umat beragama. Bidang pendidikan menekankan pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penurunan buta aksara melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan minat baca. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan.
4. Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
Upaya pemulihan perekonomian melalui kebijakan insentif fiskal, promosi investasi daerah, pengembangan agribisnis, pembentukan KEK Bojonegara dan KEK Cilegon, penyiapan terminal agribisnis, penumuhkembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah.
5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Revisi struktur dan pola ruang wilayah dalam rangka penyesuaian peraturan perundangan dan pemekaran wilayah administrasi, penurunan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, tata ruang berbasis mitigasi bencana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, penataan sumber daya alam pada kawasan budi daya, pemulihan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam, pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pembinaan dan fasilitasi daerah otonom baru, dukungan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilpres tahun 2009, pemilukada, penataan batas antar wilayah administratif, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat, fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru, peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum

7. Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis; Pengembangan 3 (tiga) 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten yang didukung dalam bentuk (1) kawasan strategis fungsional bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan strategis fungsional pelabuhan hub internasional Bojonegara, serta (3) kawasan strategis fungsional permukiman skala besar Kota Keekerabatan Maja; perencanaan pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, rencana pembangunan jalan tol ruas baru, pembangunan dan operasionalisasi PLTU Suralaya, PLTU Labuan dan PLTU Kemiri.

Diharapkan pada pembangunan 5 (lima) tahun tahap ke-2 ini akan terjadi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2008 sebesar **69,7** menjadi sebesar **72,88** pada Tahun 2012.

6.3 RPJM KE-3 (TAHUN 2013-2017) / TAHAP AKSELERASI - I

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-3 ini diarahkan untuk memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui percepatan pembangunan atau akselerasi pembangunan di segala bidang.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Penurunan jumlah rumah tangga miskin, peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha, fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha,
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan. Pembangunan aspek pendidikan diarahkan pada peningkatan APM, APK, dan RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan minat baca dan budaya baca masyarakat. Pada bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan bermutu, pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan; peningkatan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian; Peningkatan iklim investasi yang kondusif, pemberian insentif pajak bagi investor, pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor.
4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional, Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih, Pengembangan kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi penghubung antara P.Jawa - P.Sumatera, Peningkatan pemanfaatan energi alternatif, penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu.

5. Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam pada kawasan budi daya, Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup, Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; Peningkatan kerjasama pembangunan, Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain, Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi,
7. Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis. Pembangunan 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub internasional Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja; Pelaksanaan pembangunan PIB, konstruksi JSS, konstruksi jalan tol ruans baru, operasionalisasi PLTU 1 Suralaya, PLTU 2 Labuan, dan PLTU 3 Kemiri.

Dengan tercapainya tahap akselerasi pada akhir tahun RPJM ke-3 diharapkan akan dicapai angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten menjadi **75,48** pada Tahun 2017.

6.4 RPJM KE-4 (TAHUN 2018-2022) / TAHAP AKSELERASI - II

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian; Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub internasional Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Keekerabatan Maja; Operasionalisasi PIB, Operasionalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya, operasionalisasi tol ruans baru.

Setelah pelaksanaan pembangunan pada tahap akselerasi-2 (RPJM ke-4), diharapkan angka IPM Provinsi Banten dapat mendekati kategori tinggi (NUDS, 80) yaitu sebesar **78,08** pada Tahun 2022.

6.5 RPJM KE-5 (TAHUN 2023-2025) / TAHAP MODERNISASI

Pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja, fasilitasi kerjasama kewirausahaan berorientasi global,
2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
Pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.
3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;
Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan pedesaan (rural-urban linkage), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk

pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.

4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasarana dan Sarana dasar yang berkualitas, mantap, dan terjangkau , infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian , akuntabilitas yang mendukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang , pelayanan sumberdaya air , energi ,dan listrik yang ditunjang teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi,
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah,
7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis..
Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan local secara terpadu dan didukung infrastruktur yang memadai dan mantap, serta tingginya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik.

Tahap RPJM ke-5 Provinsi Banten memasuki era modernisasi dengan mempertahankan keunggulan daerah sehingga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat mampu ditempuh dengan target angka Indeks Pembangunan Manusia mencapai kategori tinggi yaitu **80,08** pada Tahun 2025.